

Pangab Habisi Prabowo Dkk

Pecat dari ABRI, Nonjobkan Chairawan dan Muchdi

Jakarta, JP.-

Tamat sudah riwayat mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto di ABRI. Menantu mantan Presiden Soeharto yang pernah disebut *the rising star* karena karier militernya yang melejit itu dipecat dari kesatuan ABRI. Ia dianggap bersalah dalam kasus penculikan para aktivis prodemokrasi. Keputusan tentang nasib Prabowo itu diumumkan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto di Mabes ABRI Merdeka Barat, Jakarta, kemarin. Ikut mendampingi Pangab, Ketua DKP (Dewan Kehormatan Perwira) KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur Lemhanas Letjen TNI Agum Gumelar, Kasum ABRI Letjen TNI Fachrur Rozi, dan beberapa perwira tinggi.

Detik-detik pengumuman sanksi terhadap Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi Pr, dan Kolonel Inf Chairawan itu sangat menegangkan. Sebab, semua perwira tinggi maupun puluhan wartawan dalam negeri dan asing dikondisikan untuk menunggu beberapa jam dalam posisi tidak menentu. Sebab, keputusan pemberian sanksi kepada Prabowo es itu baru dirapatkan menjelang detik-detik pengumuman.

Ternyata, keputusannya amat tegas: Mengakhiri karier militer Prabowo. Sedangkan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi Pr dan mantan Dangroup IV/Kopassus Kolonel Inf Chairawan dibebastugaskan dari jabatan struktural ABRI. Artinya, mereka masih tetap berstatus sebagai ABRI, tapi tidak diberi jabatan apa pun sampai masa pensiun.

Sanksi yang dijatuhkan kepada Muchdi Pr dan Chairawan ini mirip dengan yang diterima mantan Pangkoloop Timtim Brigjen Warouw dan Pangdam IX/Udayana Mayjen Sintong Panjaitan.

► Baca: Pangab..., hal. 2, kol. 1

EPISODE TERAKHIR?



PRABOWO (DIPECAT)



CHAIRAWAN (DINONJOBKAN)



MUCHDI PR. (DINONJOBKAN)

"Kalau bisa mengungkapkan dengan nyata bahwa penculikan itu atas suruhan ketiga perwira tersebut, pasti mereka bisa dimahmilkan."

WIRANTO

Terungkap, Kasus Wartawan Australia yang Tewas di Timtim

Sydney, JP.-

Sebuah misteri besar diungkap kemarin. Dinyatakan, lima wartawan Australia yang tewas di Balibo sewaktu meliput integrasi Timor Timur (Timtim), 23 tahun silam, adalah "korban" kebijakan politik Australia sendiri. Pihak Indonesia sebenarnya sudah memberikan informasi mendetail kepada Kedubes Australia di Jakarta tentang rencana serangan ke Balibo itu.

Namun, informasi tersebut tidak sampai ke media tempat lima awak media Australia itu bekerja. Bahkan, bisa dikatakan, informasi itu terlambat sampai di tangan para pemimpin Australia.

Karena itu, bisa dikatakan, pemerintah Australia sendiri yang lengah dalam melindungi keselamatan lima awak media itu. Meski demikian, selama 23 tahun, pihak pejabat Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia berusaha menutupi fakta yang ada.

Adalah Hamish McDonald, redaktur internasional harian *The Sydney Morning Herald* (SMH), yang kemarin membeber laporan eksklusif itu di halaman depan korannya.

Mengutip dokumen resmi dan sumber-sumber di Deplu Australia, SMH menyatakan, tidak benar tentara Indonesia sengaja membunuh lima awak media Negeri Kanguru itu.

Yang benar, karena tidak ada peringatan dari aparat pemerintah, maka sangat mungkin para wartawan itu tewas lantaran terjebak dalam sengitnya baku tembak. Kelima wartawan itu adalah Malcolm Rennie, 28 tahun, dan kamerawan Brian Peters, 29 tahun. Keduanya berkewarganegaraan Inggris yang kala itu bekerja untuk stasiun televisi *Channel Nine* di Melbourne.

Tiga korban lain adalah wartawan Greg Shackleton, 27 tahun; juru suara Tony Stewart, 21 tahun; dan kamerawan Gary Cunningham, seorang warganegara Selandia Baru berusia 27 tahun. Ketiganya bekerja untuk *Channel Seven*, juga di Melbourne. (sol/smb/afp/rtr/ap/dpa)

PANTANG MENYERAH LANJUTKAN KULIAH
 • BEA • MBA • DBA Hanya Rp 2 juta

SURABAYA:
Puskopal Armatim Lt.3
Jl. Ikan Dorang No.1
Tel. (031) 3573677, 79

JAKARTA:
Hotel Wisata Internasional Lt.9
Jl. M.H. Thamrin Jakarta
Tel.31900441-3 Fax.31900443

Kemal: Sanksi Itu Terlalu Ringan

Jakarta, JP.-

Sudah cukup adilkah sanksi untuk Prabowo Subianto dan kawan-kawan? Sejumlah jenderal purnawirawan ABRI menyatakan terlalu ringan. Yang menyatakan demikian, antara lain, Mantan Pangkostrad Letjen TNI (Pur) Kemal Idris dan mantan Kassospol ABRI Letjen TNI (Pur) Bambang Triantoro. Menurut Kemal, sanksi tersebut tak sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuat Prabowo, Mayjen Muchdi Pr, dan Kolonel Chairawan. "Jika tidak ditindaklanjuti, keputusan Pangab yang hanya menjatuhkan sanksi demikian bisa mencoreng nama ABRI. Sebagai mantan ABRI, saya ikut malu dengan aib yang telah mereka perbuat," ucapnya.

Kemal menginginkan Pangab menindaklanjuti sanksi itu dengan membawa Prabowo ke mahmil. Hal senada diungkapkan Bambang Triantoro. Ia mengatakan, meski sudah ada sanksi administratif, ketiga perwira tersebut harus diseret ke mahmil. Bahkan, tak

tertutup kemungkinan mereka diadili di pengadilan negeri, jika ada keluarga korban penculikan menuntut mereka.

"Suara" Kemal Idris lebih galak lagi. Menurut dia, Prabowo mestinya tak sekadar dipensiunkan atau disipilkan. Tapi, mestinya ia dipecat dengan tidak hormat dan dimahmilkan. "Sebab, lewat mahmil, akan diketahui siapa-siapa pejabat yang terlibat kasus penculikan itu," tandas Kemal.

Kemal juga menyayangkan, pemeriksaan DKP terhadap ketiga perwira tersebut ternyata belum mengungkap nasib empat belas aktivis prodemokrasi yang hingga kini belum ditemukan. "Dengan adanya pengakuan Prabowo, Muchdi, dan Chairawan, logikanya, nasib keempat belas aktivis yang belum ditemukan itu bisa terungkap. Tetapi, kenapa hal itu justru tidak dilakukan," tanyanya.

► Baca: Keluarga Korban Bisa..., hal. 2, kol. 4